



Peran Kualitas Perencanaan Anggaran dan Partisipasi Legislatif dalam Meningkatkan Efisiensi Penganggaran pada Sekretariat DPRK Yahukimo

Abraham Permak¹, Baharuddin², Petrus Peleng Roreng³

^{1,2,3}) Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

|| Submitted: 12-06-2026 || Review 19-06-2026 || Revision 28-06-2026 || Accepted 10-07-2026

Abstrak

Efisiensi penganggaran merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Populasi penelitian meliputi seluruh aparatur Sekretariat DPRK dan anggota DPRK Kabupaten Yahukimo yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan 70 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda setelah memenuhi uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Partisipasi legislatif juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Secara simultan, kedua variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas proses perencanaan anggaran yang didukung partisipasi legislatif yang aktif dapat mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perencanaan dan optimalisasi peran legislatif menjadi strategi penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: kualitas perencanaan anggaran; partisipasi legislatif; efisiensi penganggaran; pengelolaan keuangan daerah; DPRK Kabupaten Yahukimo.

Abstract

Budget efficiency is a fundamental prerequisite for achieving accountable and performance-oriented public financial management. This study aimed to examine the effects of budget planning quality and legislative participation on budget efficiency at the Regional People's Representative Council (DPRK) Secretariat of Yahukimo Regency. A quantitative explanatory survey design was employed involving 70 respondents selected through a total sampling technique, consisting of administrative staff and members of the DPRK directly engaged in the budgeting process. Primary data were collected using structured questionnaires and supported by documentation. The data were analyzed using multiple linear regression after fulfilling the requirements of validity, reliability, and classical assumption tests. The findings reveal that budget planning quality has a positive and significant effect on budget efficiency. Legislative participation also exerts a positive and significant influence on budget efficiency.

¹E-mail: perindinganmakale@gmail.com

²E-mail: dr_baharuddin05@gmail.com

³E-mail: petrusroreng1@gmail.com

Furthermore, both independent variables simultaneously have a significant effect on budget efficiency. These findings highlight that improving the quality of budget planning and strengthening legislative participation are essential strategies for enhancing budget efficiency, transparency, and accountability in local government financial management. The study provides empirical evidence to support the development of more effective and participatory budgeting practices within regional public institutions.

Keywords: *budget planning quality; legislative participation; budget efficiency; public financial management; local government.*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyusun anggaran yang memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melalui prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi penganggaran menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah memanfaatkan sumber daya publik secara ekonomis untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, serta pencapaian kinerja organisasi sektor publik (Juned & Joniansyah, 2026; Rahayu & Khoirunurrofik, 2022).

Dalam praktiknya, efisiensi penganggaran tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya fiskal, tetapi juga oleh kualitas proses penyusunan anggaran. Perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan riil, indikator kinerja yang terukur, dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan akan menghasilkan alokasi anggaran yang lebih rasional dan mampu meminimalkan pemborosan (Roreng & Halik, 2025). Sebaliknya, lemahnya kualitas perencanaan sering kali menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan organisasi, rendahnya tingkat penyerapan anggaran, serta munculnya belanja yang kurang memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah (Fadillah et al., 2021). Kondisi tersebut menjadikan kualitas perencanaan anggaran sebagai salah satu determinan utama efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selain kualitas perencanaan, partisipasi lembaga legislatif juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan proses penganggaran. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD/DPRK memiliki fungsi anggaran yang meliputi pembahasan, penyempurnaan, persetujuan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterlibatan legislatif yang aktif, didukung kapasitas teknis yang memadai, diyakini mampu meningkatkan kualitas keputusan anggaran melalui mekanisme pengawasan dan proses deliberasi yang lebih objektif. Sebaliknya, partisipasi legislatif yang rendah berpotensi menghasilkan alokasi anggaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun prioritas pembangunan daerah (Usman et al., 2024).

Meskipun demikian, berbagai pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan efisiensi penganggaran. Kajian mengenai efisiensi belanja daerah menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya kualitas perencanaan, serta belum optimalnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif masih menjadi penyebab utama belum optimalnya kinerja penganggaran daerah.

Bahkan, penelitian terbaru mengenai implementasi anggaran daerah menegaskan bahwa kualitas tata kelola fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran secara konsisten (Nuranindita et al., 2026; Roreng et al., 2026).

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan dukungan administratif dan keuangan bagi pelaksanaan fungsi legislatif. Berdasarkan latar belakang penelitian, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas perencanaan anggaran, tingkat partisipasi anggota DPRK dalam proses penyusunan anggaran, serta belum optimalnya efisiensi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRK. Kondisi tersebut tercermin dari adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan riil organisasi dengan alokasi anggaran, rendahnya kualitas analisis kebutuhan, serta variasi realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Selain itu, laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan juga masih menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagaimana disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Indikasi Permasalahan	Dampak terhadap Efisiensi
1	Kualitas perencanaan anggaran belum optimal	Perencanaan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan analisis yang komprehensif	Potensi pemborosan anggaran
2	Partisipasi legislatif belum maksimal	Kapasitas teknis anggota legislatif dan keterbatasan waktu pembahasan anggaran	Pengawasan dan penyempurnaan anggaran kurang optimal
3	Realisasi anggaran berfluktuasi	Ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi program	Efektivitas pelaksanaan kegiatan menurun
4	Temuan pemeriksaan BPK	Masih terdapat kelemahan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran	Menurunkan kualitas tata kelola keuangan daerah

Sumber: Diolah dari observasi awal terhadap LHP BPK Kabupaten Yahukimo.

Di sisi lain, isu efisiensi penganggaran menjadi semakin penting bagi Kabupaten Yahukimo mengingat karakteristik wilayahnya sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, setiap rupiah anggaran publik harus dikelola secara efisien agar mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas proses perencanaan anggaran dan optimalisasi peran legislatif merupakan dua aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Kajian mengenai efisiensi penganggaran sektor publik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian menempatkan kualitas perencanaan anggaran sebagai determinan utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang berbasis kebutuhan, berorientasi pada kinerja, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan terbukti mampu meningkatkan kualitas alokasi sumber daya publik dan meminimalkan pemborosan anggaran (OECD, 2019; World Bank, 2021). Selain itu, implementasi *performance-based budgeting* mendorong organisasi sektor publik untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan target kinerja yang terukur sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kualitas perencanaan anggaran tidak dapat dipisahkan dari proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya lembaga legislatif. Fungsi anggaran yang dimiliki DPRD/DPRK merupakan mekanisme *checks and balances* yang bertujuan memastikan bahwa APBD disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas pengawasan legislatif dan keterlibatan anggota dewan dalam pembahasan anggaran berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas fiskal dan efektivitas belanja publik (Kim et al., 2023; OECD, 2019).

Di Indonesia, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penganggaran umumnya dilakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada institusi eksekutif sehingga belum memberikan gambaran mengenai dinamika penganggaran pada lembaga legislatif daerah (Mediaty et al., 2025; Nislandi & Munari, 2023).

Lebih lanjut, penelitian mengenai partisipasi legislatif dalam proses penganggaran sebagian besar membahas fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD secara umum, sedangkan kajian yang menghubungkan partisipasi legislatif dengan efisiensi penganggaran pada unit kerja Sekretariat DPRD/DPRK masih relatif terbatas. Padahal, Sekretariat DPRK merupakan perangkat daerah yang secara administratif bertanggung jawab menyediakan dukungan kelembagaan bagi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRK. Dengan demikian, kualitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRK memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan fungsi legislatif.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
OECD (2019)	Budgeting and Public Governance	Perencanaan berbasis kinerja meningkatkan efisiensi anggaran	Tidak mengkaji lembaga legislatif daerah
World Bank (2021)	Public Financial Management	Kualitas tata kelola fiskal meningkatkan efektivitas belanja publik	Tidak menguji partisipasi legislatif
Kim & Park (2022)	Legislative Oversight and Fiscal Accountability	Pengawasan legislatif meningkatkan akuntabilitas fiskal	Tidak menguji kualitas perencanaan anggaran

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
Behn (2020)	Performance Budgeting	Perencanaan berbasis kinerja meningkatkan efisiensi organisasi publik	Konteks pemerintah pusat
Penelitian OPD Indonesia (2021–2025)	Pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan	Berfokus pada OPD eksekutif
Penelitian DPRD Indonesia (2020–2025)	Fungsi anggaran DPRD	Partisipasi DPRD meningkatkan kualitas pengawasan anggaran	Belum menguji efisiensi penganggaran Sekretariat DPRD

Tabel di atas menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara simultan menguji pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK di wilayah Papua.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*).

Pertama, *empirical gap*. Sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis efisiensi penganggaran pada organisasi perangkat daerah di lingkungan eksekutif (Budiharjo et al., 2025; Maharani et al., 2022), sedangkan penelitian yang secara khusus menjadikan Sekretariat DPRK sebagai objek penelitian masih sangat terbatas. Akibatnya, bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penganggaran pada lembaga legislatif daerah belum berkembang secara memadai.

Kedua, *contextual gap*. Hingga saat ini penelitian mengenai penganggaran publik di wilayah Papua Pegunungan masih sangat sedikit dipublikasikan dalam literatur ilmiah. Karakteristik daerah otonomi baru, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kondisi geografis, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Yahukimo memiliki konteks yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, temuan penelitian pada daerah lain belum tentu dapat digeneralisasikan pada konteks Kabupaten Yahukimo.

Ketiga, *theoretical gap*. Penelitian terdahulu umumnya menguji pengaruh kualitas perencanaan anggaran atau partisipasi legislatif secara terpisah terhadap kinerja pengelolaan keuangan (Maharani et al., 2022; Usman et al., 2024). Masih sangat sedikit penelitian yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu model empiris untuk menjelaskan efisiensi penganggaran pada lembaga legislatif daerah.

Keempat, *methodological gap*. Sebagian penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif atau studi kasus sehingga belum mampu memberikan bukti kuantitatif mengenai besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap efisiensi penganggaran (Maharani et al., 2022; Usman et al., 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda sehingga mampu mengukur pengaruh parsial maupun simultan dari kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menjadikan Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo sebagai objek penelitian, yang hingga saat ini masih sangat jarang dikaji dalam literatur administrasi publik di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif dalam satu model konseptual untuk menjelaskan efisiensi

penganggaran. Ketiga, penelitian ini memberikan bukti empiris dari konteks Provinsi Papua Pegunungan, sehingga memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah pada wilayah otonomi baru dan daerah dengan karakteristik khusus.

Penelitian ini menjadi penting karena efisiensi penganggaran merupakan prasyarat utama bagi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Bagi Kabupaten Yahukimo yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan, setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan bukti empiris mengenai sejauh mana kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif berkontribusi terhadap efisiensi penganggaran. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi Sekretariat DPRK, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dan para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas tata kelola penganggaran daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena empiris, serta kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kualitas perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo?
2. Apakah partisipasi legislatif berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo?
3. Apakah kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo?

Tinjauan Literatur

Grand Theory: Agency Theory

Penelitian ini berlandaskan **Agency Theory** yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Dalam sektor publik, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah dan DPRD/DPRK sebagai *agent* untuk mengelola keuangan negara secara efisien, transparan, dan akuntabel (Kim et al., 2023). Hubungan tersebut mengandung potensi *agency problem* akibat adanya asimetri informasi serta perbedaan kepentingan antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian, pengawasan, dan partisipasi dalam proses penganggaran agar penggunaan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam perspektif *Agency Theory*, kualitas perencanaan anggaran menjadi mekanisme yang mampu mengurangi ketidakpastian dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran (Nuranindita et al., 2026). Perencanaan yang disusun secara sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung indikator kinerja yang jelas akan mengurangi peluang terjadinya pemborosan maupun alokasi sumber daya yang tidak produktif. Di sisi lain, partisipasi legislatif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) yang memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan APBD (Slamet Widodo, 2026). Dengan demikian, semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan semakin tinggi partisipasi legislatif, semakin tinggi pula efisiensi penganggaran yang dapat dicapai. Temuan-temuan empiris terbaru menunjukkan bahwa pengawasan legislatif dan kualitas proses anggaran merupakan instrumen penting untuk mengurangi inefisiensi fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Jiang & Chi, 2024; Roreng et al., 2026).

Kualitas Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan tahapan fundamental dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena menentukan arah alokasi sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan (Sanggalangi et al., 2025). Anggaran yang berkualitas disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, didukung data yang akurat, mempertimbangkan prioritas pembangunan, serta berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) (Paembonan et al., 2024). Dalam sistem *performance-based budgeting*, kualitas perencanaan tidak hanya diukur dari ketepatan penyusunan dokumen anggaran, tetapi juga dari keterkaitan antara tujuan strategis, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya (OECD, 2019).

Reformasi pengelolaan keuangan publik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja cenderung memiliki efisiensi belanja yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah yang masih berorientasi pada pendekatan administratif semata. Penguatan sistem manajemen kinerja anggaran juga terbukti meningkatkan kualitas penggunaan anggaran melalui peningkatan orientasi hasil dan kepatuhan fiskal (Roreng et al., 2026).

Dalam penelitian ini, kualitas perencanaan anggaran dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam menyusun anggaran yang realistis, sistematis, sesuai kebutuhan organisasi, selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, serta memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Partisipasi Legislatif

Partisipasi legislatif merupakan keterlibatan aktif anggota DPRD/DPRK dalam proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengawasan anggaran daerah (Slamet Widodo, 2026). Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, fungsi anggaran yang dimiliki DPRD/DPRK merupakan salah satu instrumen utama untuk mewujudkan prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Literatur terkini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi legislatif tidak hanya ditentukan oleh intensitas kehadiran anggota dewan dalam pembahasan anggaran, tetapi juga oleh kapasitas teknis, kualitas deliberasi, akses terhadap informasi anggaran, serta kemampuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD (Andi Faisal et al., 2024; Slamet Widodo, 2026). Penelitian Kim et al. (2023) menunjukkan bahwa proses pembahasan anggaran legislatif yang lebih komprehensif mampu meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah melalui pengurangan anggaran yang tidak termanfaatkan (*unused budget*) dan peningkatan kualitas keputusan fiskal.

Selain itu, kajian sistematis mengenai *budget participation* memperlihatkan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan anggaran berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keputusan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Juned & Joniansyah, 2026).

Berdasarkan perspektif tersebut, partisipasi legislatif dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keterlibatan anggota DPRK dalam memberikan masukan, melakukan pembahasan, mengevaluasi, serta mengawasi proses penyusunan anggaran Sekretariat DPRK.

Efisiensi Penganggaran

Efisiensi penganggaran merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin

(Karikarti et al., 2025). Dalam pengelolaan keuangan daerah, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan besarnya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dengan ketepatan alokasi anggaran terhadap prioritas pembangunan serta kemampuan organisasi menghasilkan nilai publik (*public value*) (Pualillin et al., 2025).

Reformasi manajemen kinerja anggaran di berbagai negara menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran meningkat ketika proses penyusunan anggaran berbasis kinerja didukung oleh sistem evaluasi yang memadai, indikator kinerja yang terukur, dan koordinasi yang baik antar-lembaga (Jiang & Chi, 2024). Penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja juga terbukti mampu mengurangi tekanan fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan belanja publik (Juned & Joniansyah, 2026).

Dalam penelitian ini, efisiensi penganggaran diukur berdasarkan kemampuan Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo mengelola anggaran secara ekonomis, tepat sasaran, sesuai kebutuhan organisasi, serta mampu mendukung pelaksanaan fungsi legislatif secara optimal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran terhadap Efisiensi Penganggaran

Agency Theory menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang berkualitas mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Abbasov, 2025). Perencanaan yang berbasis kebutuhan, didukung indikator kinerja yang jelas, dan disusun secara sistematis akan menghasilkan alokasi anggaran yang lebih efisien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran berhubungan positif dengan efisiensi penggunaan anggaran dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Jiang & Chi, 2024; Roreng et al., 2026).

H1: *Kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo.*

Pengaruh Partisipasi Legislatif terhadap Efisiensi Penganggaran

Dalam perspektif Agency Theory, legislatif berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel (Kim et al., 2023). Partisipasi legislatif yang aktif meningkatkan kualitas pembahasan anggaran, memperkuat transparansi, dan mengurangi potensi inefisiensi dalam penggunaan anggaran publik (Slamet Widodo, 2026). Penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas deliberasi legislatif dan pengawasan anggaran berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi fiskal pemerintah daerah (Park et al., 2023).

H2: *Partisipasi legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo.*

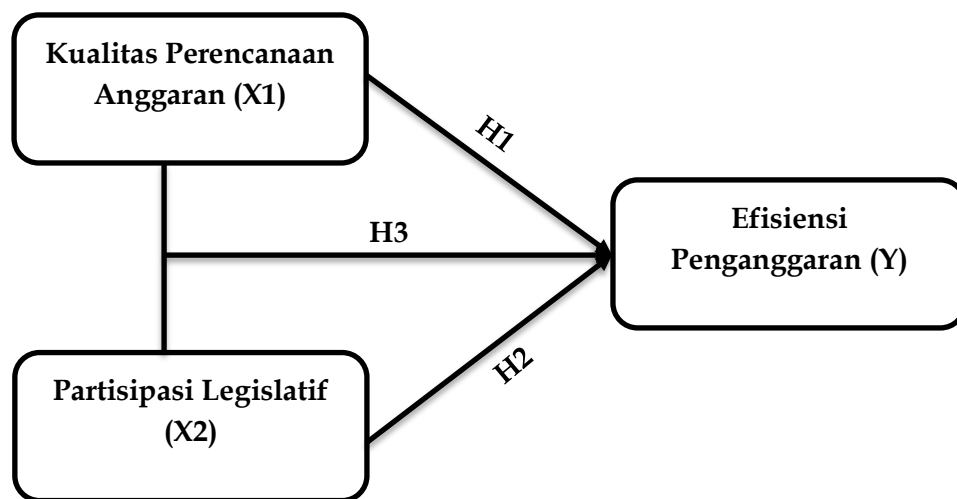
Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran dan Partisipasi Legislatif terhadap Efisiensi Penganggaran

Kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif (Jiang & Chi, 2024). Perencanaan yang baik menyediakan dasar pengambilan keputusan yang rasional, sedangkan partisipasi legislatif memastikan proses penganggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel (Ihsan et al., 2026). Sinergi kedua aspek tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan

anggaran daerah (Usman et al., 2024).

H3: *Kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo.*

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran. Hubungan antarvariabel tersebut disajikan pada **Gambar 1**.



Sumber: Persepsi Penulis (2026)

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menganalisis pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Yahukimo. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menguji hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2020). Desain explanatory digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antarvariabel sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Lokasi penelitian dipilih karena Sekretariat DPRK memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRK, sehingga menjadi organisasi yang relevan untuk mengkaji kualitas perencanaan anggaran, partisipasi legislatif, dan efisiensi penganggaran. Pengumpulan data dilaksanakan selama Februari hingga April 2026.

Populasi penelitian terdiri atas seluruh anggota DPRK Kabupaten Yahukimo periode 2024–2029 serta aparatur Sekretariat DPRK yang terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan data kelembagaan, jumlah populasi sebanyak 70 orang, yang terdiri atas 35 anggota DPRK dan 35 aparatur

Sekretariat DPRK. Mengingat jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota populasi memenuhi kriteria penelitian, teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling (sensus) sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai objek penelitian dan mengurangi potensi *sampling error* (Sugiyono, 2021).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden menggunakan skala Likert lima poin, yaitu skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel yang dikembangkan dari teori dan penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan sektor publik. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi instrumen penelitian. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar daripada r tabel pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 (Riadi, 2016).

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 . Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Breusch-Pagan Test, sedangkan uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson. Model regresi dinyatakan memenuhi asumsi klasik apabila tidak ditemukan gejala pelanggaran terhadap keempat pengujian tersebut (Pallant, 2020).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 27. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi efisiensi penganggaran. Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) (Okello, 2024; Pallant, 2020; Riadi, 2016).

Tabel 3. Item Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Kode Indikator	Jumlah Item	Skala
Kualitas Perencanaan Anggaran	X1.1 Kesesuaian penyusunan anggaran dengan kebutuhan organisasi	5	Likert (1-5)

Variabel	Kode Indikator	Jumlah Item	Skala	
Partisipasi Legislatif	X1.2	Kejelasan tujuan dan sasaran anggaran	4	Likert (1-5)
	X1.3	Ketepatan penyusunan program dan kegiatan		
	X1.4	Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan		
		Ketepatan alokasi anggaran		
	X2.1	Keterlibatan dalam pembahasan anggaran		
	X2.2	Pemberian masukan terhadap rancangan anggaran		
	X2.3	Pengawasan proses penyusunan anggaran		
	X2.4	Kualitas pengambilan keputusan anggaran		
Efisiensi Penganggaran	Y1	Ketepatan penggunaan anggaran	4	Likert (1-5)
	Y2	Efektivitas alokasi sumber daya		
	Y3	Kesesuaian realisasi dengan rencana		
	Y4	Optimalisasi penggunaan anggaran		

Sumber: Diadaptasi dari penelitian terdahulu (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden memberikan gambaran mengenai komposisi subjek penelitian yang berpartisipasi dalam pengumpulan data. Responden penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Oleh karena itu, responden dipilih dari dua kelompok utama, yaitu anggota DPRK Kabupaten Yahukimo dan aparatur Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Pemilihan kedua kelompok tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kualitas perencanaan anggaran, partisipasi legislatif, serta efisiensi penganggaran berdasarkan perspektif legislatif maupun aparatur sekretariat.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak **70 orang** yang diperoleh menggunakan teknik **total sampling**, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Rincian komposisi responden disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Responden

No.	Kelompok Responden	Jabatan/Posisi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Legislatif Kabupaten	DPRK Seluruh anggota DPRK aktif periode 2024-2029	35	50,0

No.	Kelompok Responden	Jabatan/Posisi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	Yahukimo			
2	Aparatur Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo	Sekretaris DPRK, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, serta staf yang menangani perencanaan dan keuangan	35	50,0
Total			70	100,0

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan **Tabel 4**, komposisi responden menunjukkan proporsi yang seimbang antara unsur legislatif dan aparatur Sekretariat DPRK, masing-masing sebanyak **35 orang (50,0%)**. Komposisi tersebut memberikan representasi yang memadai terhadap seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam proses penganggaran di lingkungan DPRK Kabupaten Yahukimo. Anggota DPRK berperan dalam fungsi pembahasan, persetujuan, dan pengawasan anggaran, sedangkan aparatur Sekretariat DPRK bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengelolaan, serta pelaksanaan administrasi anggaran. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari kedua kelompok responden diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis melalui analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik sehingga menghasilkan estimasi parameter yang bersifat tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*). Pengujian meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan metode **Kolmogorov-Smirnov**. Hasil pengujian disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Metode	Statistik Asymp. Sig.	Kriteria	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov	0,046	0,997	Sig. > 0,05 Normal

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026).

Berdasarkan **Tabel 5**, nilai Asymp. Sig. sebesar 0,997 lebih besar daripada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Kualitas Perencanaan Anggaran (X_1)	0,949	1,054	Tidak terjadi multikolinearitas
Partisipasi Legislatif DPRK (X_2)	0,949	1,054	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026).

Nilai Tolerance masing-masing variabel sebesar 0,949, lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai VIF sebesar 1,054, lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga variabel independen dapat digunakan secara simultan dalam analisis.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan **Breusch-Pagan Test** untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Metode	Test Statistic	df	Sig.	Keterangan
Breusch-Pagan Test	0,619	2	0,734	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026).

Nilai signifikansi sebesar **0,734** lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, residual memiliki varians yang homogen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik **Durbin-Watson**. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Metode	Nilai DW	Kriteria	Keterangan
Durbin-Watson	1,815	$1,5 < DW < 2,5$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026).

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,815 berada pada rentang 1,5–2,5, sehingga model regresi memenuhi asumsi independensi residual dan tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran (X_1) dan Partisipasi Legislatif DPRK (X_2) terhadap Efisiensi Penganggaran (Y). Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,089 + 0,528X_1 + 0,444X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,089 menggambarkan nilai efisiensi penganggaran ketika seluruh variabel independen

bernilai nol. Koefisien regresi Kualitas Perencanaan Anggaran (0,528) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas perencanaan anggaran akan meningkatkan efisiensi penganggaran sebesar 0,528 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien Partisipasi Legislatif DPRK (0,444) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi legislatif sebesar satu satuan akan meningkatkan efisiensi penganggaran sebesar 0,444 satuan.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel	B	Std. Error	Beta	t hitung	Sig.	Keputusan
Konstanta	0,089	0,286	-	0,310	0,757	-
Kualitas Perencanaan Anggaran (X ₁)	0,528	0,071	0,564	7,391	0,000	H ₁ diterima
Partisipasi Legislatif DPRK (X ₂)	0,444	0,076	0,445	5,836	0,000	H ₂ diterima

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kualitas Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran ($\beta = 0,564$; $t = 7,391$; $p < 0,001$). Selain itu, Partisipasi Legislatif DPRK juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran ($\beta = 0,445$; $t = 5,836$; $p < 0,001$). Dengan demikian, Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 diterima.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	50,250	2	25,125	57,063	0,000
Residual	29,500	67	0,440		
Total	79,750	69			

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026).

Nilai F hitung sebesar 57,063 dengan $p < 0,001$ menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Dengan demikian, Hipotesis 3 diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi efisiensi penganggaran disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai
R Square	0,630
Adjusted R Square	0,619

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026).

Nilai R² sebesar 0,630 menunjukkan bahwa 63,0% variasi efisiensi penganggaran

dapat dijelaskan oleh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif. Adapun 37,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kualitas sistem informasi penganggaran, kepemimpinan organisasi, transparansi, dan mekanisme evaluasi anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran terhadap Efisiensi Penganggaran

Bagian ini membahas hasil pengujian Hipotesis 1 yang menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,528 dengan nilai $t = 7,391$ dan $p < 0,001$, sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas perencanaan anggaran yang disusun oleh organisasi, semakin tinggi tingkat efisiensi penganggaran yang dapat dicapai.

Secara konseptual, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui **Stewardship Theory** yang memandang bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat (Davis et al., 1997). Perencanaan anggaran yang disusun secara sistematis, berbasis kebutuhan organisasi, serta selaras dengan prioritas pembangunan akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran sehingga dapat meminimalkan pemborosan anggaran (Abbasov, 2025; Jiang & Chi, 2024).

Dari perspektif manajemen sektor publik, kualitas perencanaan anggaran berfungsi sebagai dasar utama dalam proses pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah. Perencanaan yang baik memungkinkan organisasi menetapkan prioritas kegiatan secara rasional, mengurangi duplikasi program, serta meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan anggaran secara langsung akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah (Roreng & Halik, 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuranindita et al. (2026) yang menemukan bahwa kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Mutiarin et al. (2020) yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis kinerja mampu meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi belanja pemerintah daerah. Selain itu, Khaerah et al. (2026) menyimpulkan bahwa kualitas proses perencanaan merupakan determinan utama keberhasilan implementasi anggaran pada organisasi sektor publik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji lingkungan Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda karena melibatkan fungsi pendukung legislatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas perencanaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi penganggaran pada institusi pendukung lembaga legislatif daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat Stewardship Theory dalam konteks tata kelola keuangan sektor publik dengan menunjukkan bahwa kualitas proses

perencanaan merupakan determinan penting dalam mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran (Davis et al., 1997). Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo untuk memperkuat kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan mekanisme perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pengaruh Partisipasi Legislatif terhadap Efisiensi Penganggaran

Hasil pengujian Hipotesis 2 menunjukkan bahwa partisipasi legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Nilai koefisien regresi sebesar 0,444, dengan $t = 5,836$ dan $p < 0,001$, mengindikasikan bahwa peningkatan keterlibatan anggota DPRK dalam proses pembahasan dan pengawasan anggaran mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif **Agency Theory** yang menempatkan DPRK sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). Partisipasi legislatif yang aktif dalam proses pembahasan APBD memungkinkan terjadinya proses evaluasi terhadap usulan program, identifikasi potensi pemborosan, serta penyempurnaan alokasi anggaran sebelum ditetapkan. Dengan demikian, keterlibatan legislatif mampu meningkatkan kualitas keputusan anggaran dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Selain fungsi pengawasan, partisipasi legislatif juga berperan sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat cenderung lebih tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Roreng et al. (2026) yang menemukan bahwa partisipasi legislatif meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Abdullah et al. (2020) juga menunjukkan bahwa keterlibatan legislatif secara aktif dalam proses penganggaran berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi belanja daerah. Selanjutnya, Ritonga et al. (2025) melaporkan bahwa pengawasan legislatif merupakan salah satu determinan utama keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, sehingga memperluas bukti empiris mengenai pentingnya partisipasi legislatif dalam meningkatkan efisiensi penganggaran pada wilayah otonomi khusus yang masih relatif jarang diteliti.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan Agency Theory dalam konteks hubungan legislatif dan pengelolaan keuangan daerah (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRK dalam bidang penganggaran melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga fungsi pembahasan dan pengawasan anggaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran dan Partisipasi Legislatif terhadap Efisiensi Penganggaran

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Nilai $F = 57,063$ dengan $p < 0,001$ menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi efisiensi penganggaran secara signifikan.

Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,630 menunjukkan bahwa sebesar 63,0% variasi efisiensi penganggaran dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi penganggaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas proses pengawasan dan partisipasi legislatif. Perencanaan yang baik tanpa pengawasan legislatif yang efektif berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam implementasi anggaran. Sebaliknya, pengawasan legislatif yang kuat tanpa didukung perencanaan yang berkualitas juga tidak akan menghasilkan penggunaan anggaran yang optimal. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan OECD (2019) mengenai pentingnya integrasi antara *budget planning*, *legislative oversight*, dan *public financial management* dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sektor publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Kim et al. (2023) yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran pemerintah dipengaruhi oleh sinergi antara kualitas perencanaan dan efektivitas fungsi pengawasan legislatif.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara Stewardship Theory dan Agency Theory memberikan kerangka yang komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penganggaran pada organisasi sektor publik. Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk meningkatkan integrasi antara proses perencanaan anggaran dan mekanisme pengawasan legislatif melalui penyusunan standar operasional penganggaran, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta peningkatan transparansi informasi anggaran.

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang manajemen keuangan sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi penganggaran pada lembaga legislatif daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif merupakan dua determinan penting yang secara parsial maupun simultan memengaruhi efisiensi penganggaran. Temuan tersebut memperkuat pandangan Stewardship Theory yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel melalui proses perencanaan anggaran yang berkualitas. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga mendukung Agency Theory, yang menempatkan legislatif sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai kepentingan publik.

Selain memperkuat kedua landasan teori tersebut, penelitian ini juga memperluas bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penganggaran pada lingkungan Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, yang hingga saat ini masih relatif terbatas dalam kajian akademik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan daerah, khususnya pada organisasi pendukung lembaga legislatif di wilayah otonomi khusus. Temuan ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel lain, seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi penganggaran, kepemimpinan organisasi, transparansi anggaran, serta sistem pengendalian intern pemerintah.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi **Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo** maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi penganggaran. Pertama, kualitas perencanaan anggaran perlu terus ditingkatkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan organisasi, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan anggaran juga perlu didukung oleh data yang akurat, analisis kebutuhan yang komprehensif, serta evaluasi terhadap realisasi anggaran pada periode sebelumnya agar alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.

Kedua, partisipasi anggota DPRK dalam proses pembahasan dan pengawasan anggaran perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, baik melalui pendidikan, pelatihan teknis penganggaran, maupun pendampingan mengenai tata kelola keuangan daerah. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi penganggaran tidak dapat dicapai hanya melalui perbaikan aspek teknis penyusunan anggaran, tetapi juga memerlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam setiap tahapan siklus penganggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi informasi anggaran agar proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat berjalan secara terintegrasi.

Secara keseluruhan, implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Yahukimo.

KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa: **(1)** kualitas perencanaan anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penganggaran di Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Perencanaan anggaran yang disusun secara sistematis, berbasis kebutuhan organisasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan terbukti mampu mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. **(2)** partisipasi legislatif memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi penganggaran melalui fungsi pembahasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan anggaran. Keterlibatan anggota DPRK yang lebih aktif mendorong terciptanya alokasi anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. **(3)** efisiensi penganggaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses perencanaan ataupun partisipasi legislatif secara terpisah, tetapi merupakan hasil dari sinergi kedua faktor tersebut dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi penganggaran memerlukan penguatan kapasitas perencanaan sekaligus optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan dalam seluruh siklus penganggaran.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya mencakup Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh lembaga legislatif daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik kelembagaan dan kapasitas fiskal yang berbeda. Kedua, model

penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi efisiensi penganggaran namun belum diakomodasi dalam model penelitian. Ketiga, penelitian menggunakan desain **cross-sectional**, sehingga hubungan antarvariabel yang diperoleh menggambarkan kondisi pada satu periode pengamatan dan belum mampu menangkap dinamika perubahan efisiensi penganggaran dari waktu ke waktu.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian pada berbagai pemerintah daerah atau lembaga legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model dengan memasukkan variabel lain, seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, transparansi anggaran, kepemimpinan, maupun budaya organisasi. Selain itu, penggunaan desain **longitudinal** atau pendekatan **mixed methods** akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme yang membentuk efisiensi penganggaran dalam konteks tata kelola keuangan sektor publik.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efisiensi penganggaran bukan hanya bergantung pada kualitas dokumen perencanaan ataupun efektivitas pengawasan legislatif secara individual, melainkan pada kemampuan kedua aspek tersebut untuk bekerja secara sinergis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik (*public value*) yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abbasov, R. (2025). The Effectiveness of Performance-Based Budgeting in the Public Sector : An Empirical Analysis and Policy Implications. *IBusiness*, 17(1), 56–76. <https://doi.org/10.4236/ib.2025.171003>
- Abdullah, S., Reza, M. K., Junita, A., & Meutia, T. (2020). Parliament Oversight on Local Government Financial Management an Empirical Evidence. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(3), 296–312. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i3.11687>
- Andi Faisal, Syarifuddin, Damayanti, R. A., & Nagu, N. (2024). Uncovering Budget Battle Practices: A Critical Study of Budget Participation in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e1344. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.1344>
- Budiharjo, R., Pratomo, D., & Hapsari, D. W. (2025). Local Government Financial Performance: Good Governance, the Effectiveness Internal Control and Competence. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 10(1), 125–138. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.16916>
- Davis, J. H., Schoorman, D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Eisenhardt, K. M., & Zbaracki, M. J. (1992). Strategic decision making. *Strategic Management Journal*, 13(S2), 17–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.4250130904>
- Fadillah, A. Y., Martiah, L., & Aziza, N. (2021). PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA

- MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH. *JURNAL FAIRNESS*, 10(1), 63–78. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i1.15237>
- Ihsan, M., Ketut Agung Ulupi, I. G., & Purwohedi, U. (2026). ANALYSIS THE ROLE OF BUDGET POLITICAL, BUDGET PARTICIPATION, TRANSPARENCY, BUDGET EFFICIENCY, AND OVERSIGHT IN DETERMINING PERFORMANCE-BASED BUDGET PRIORITIES FOR THE 2024 FISCAL YEAR (Case Study on the Local Government of Batang Hari Regency). *International Journal of Current Economics & Business Ventures*, 6(1), 1–16. <https://scholarsnetwork.org/journal/index.php/ijeb/article/view/484>
- Jiang, S., & Chi, Y. (2024). Impact of budget performance management reform on local fiscal relief. *International Review of Economics & Finance*, 93, 905–918. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.05.036>
- Juned, V., & Joniansyah, R. (2026). The Impact of Civil Servant Performance Management on the Efficiency of Regional Budget Utilization. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 227–244. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3077>
- Karikarti, K., Lambe, K. H. ., & Baharuddin, B. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran : Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Good Governance dalam Penggunaan. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1051>
- Khaerah, N., Pribadi, U., Purwaningsih, T., Mutiarin, D., & Sohsan, I. (2026). Beyond compliance toward effective use: how mandatory use and inter-agency coordination shape sustainable e-budgeting adoption in Bandung City, Indonesia. *Frontiers in Sustainable Cities*, 8(2026), 1814843. <https://doi.org/10.3389/frsc.2026.1814843>
- Kim, B. H., Ahn, J. G., & Jung, H. (2023). Does longer deliberation by the legislature increase the efficiency of the government budget? *Public Money & Management*, 43(5), 493–501. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.2002557>
- Maharani, H., Yazid, H., & Yulianto, A. S. (2022). The mediation role of RKA-SKPD review on the effect of effectiveness of government internal supervisory apparatus (APIP) and competence of regional financial management officials on budgetary planning. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 5(2), 1119–1126. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2058>
- Mediaty, M., Pontoh, G. T., Nagu, N., Hs, R., Mas'ud, A. A., & Abdul Azis, R. H. (2025). Human Competencies : Amplifying Financial Reporting Quality in Indonesian Local Government. *Risk and Financial Management*, 18(8), 424. <https://doi.org/10.3390/jrfm.18080424>
- Mutiarin, D., Fathani, A. T., Sakir, S., & Atmojo, M. E. (2020). Performance-Based Budgeting Review from Local Government Budget: West Sumatra in 2017-2018. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3), 191–202. <https://doi.org/10.18196/jgpp.73133>
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Nuranindita, M., Gani, L., Bachtiar, E., & Wijayanti, N. A. (2026). The role of strategy-focused organization in enhancing the performance-based budgeting

- integration. *Pacific Accounting Review*, 1–30. <https://doi.org/10.1108/PAR-09-2025-0186>
- OECD. (2019). *OECD Good Practices for Performance Budgeting*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c90b0305-en>.
- Okello, G. O. (2024). *Statistical Methods Using SPSS* (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781003386636>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Pallant, J. (2020). *SPSS Survival Manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS* (7th ed.) (7th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003117452>
- Park, J., Butler, J. S., & Petrovsky, N. (2023). Understanding Public Participation as a Mechanism Affecting Government Fiscal Outcomes: Theory and Evidence From Participatory Budgeting. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 375–389. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac025>
- Pualillin, A. L., Pasae, Y., & Jaya, A. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deiyai. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 382–387. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1099>
- Rahayu, W. S., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2 SE-Articles), 177–198. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.647>
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)* (1st ed.). CV. Andi Offset.
- Ritonga, I. T., Sari, N. P., & Kusumawardani, N. (2025). Exploring the literacy level of local government financial statements of legislative members in a developing country. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2534088. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2534088>
- Roreng, P. P., & Halik, J. B. (2025). *New Public Management: Paradigma Baru dalam Manajemen Sektor Publik* (W. Yuliani (ed.); 1st ed.). CV. Luminary Press Indonesia.
- Roreng, P. P., Halik, J. B., & Palalangan, C. A. (2026). Enhancing Local Government Financial Reporting Quality : The Role of Accrual- Based Accounting Standards , IT Utilization , and Human Resource Competence , Moderated by Organizational Commitment – Evidence from North Toraja Regency , Indonesia. *Quality-Access to Success*, 27(212), 434–447. <https://doi.org/10.47750/QAS/27.212.41>
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Slamet Widodo. (2026). Enhancing The Role of Parliament in Budget Transparency, Public Participation and Budget Oversight: Review of Open Budget Survey Results In 2023. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 10(1 SE-Articles). <https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/448>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan(Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Cv. Alfabeta.
- Usman, E., Sugianto, S., & Usman, A. (2024). Budget Politics, Motivation, In Budget Participation, And Local Government Performance In Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(2), 414–437. <https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2196>